



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086

http : //journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

Implikasi Perjanjian Damai Terhadap Aksi Intifadah Hamas

Gustri Eni Putri

Universitas Islam Indonesia

Gustrieni.Putri@uii.ac.id

Abstract

This study aims to explain how the implications of the peace agreement as Israel's strategy in reducing the Hamas intifadah action. The discussion in this study is limited to the peace agreement between Israel and the PLO known as the 1993 Declaration of Principles and the intifadah movement in 1987. This research is a qualitative study with a literature study through books, journals, and articles. This study is based on thinking which explains that as a rational actor, the state in taking foreign policy always calculates the cost and benefit. In its foreign policy, the ruling government uses the "optimization of results" criteria. Or in other words, Israel's foreign policy focuses on emphasizing the country's national interests. This rationale influenced Israel's foreign policy, which was to accept a peace agreement with the PLO to reduce the intifadah movement carried out by Hamas. And this policy provides optimal results for the state of Israel.

Keywords: Israel, Implication, Peace Agreement, Rational Actor, Intifadah movement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implikasi dari perjanjian damai sebagai strategi Israel dalam mengurangi aksi intifadah Hamas. Diskusi dalam penelitian ini terbatas pada perjanjian perdamaian antara Israel dan PLO yang dikenal sebagai Deklarasi Prinsip 1993 dan gerakan intifadah pada tahun 1987. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur melalui buku, jurnal, dan artikel. Studi ini didasarkan pada pemikiran yang menjelaskan bahwa sebagai aktor rasional, negara dalam mengambil kebijakan luar negeri selalu menghitung biaya dan manfaat. Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah yang berkuasa menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Israel berfokus pada penekanan kepentingan nasional negara itu. Dasar pemikiran ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel, yaitu menerima perjanjian damai dengan PLO untuk mengurangi gerakan intifadah yang dilakukan oleh Hamas. Dan kebijakan ini memberikan hasil optimal bagi negara Israel.

Kata kunci : Israel, Implikasi, Perjanjian Damai, Aktor Rasional, Gerakan Intifadah

Pendahuluan

Sengketa Israel dengan Palestina merupakan konflik yang sudah lama terjadi. Konflik yang menimpa al-Quds, Palestina, yang saat ini dikuasai oleh Israel. Ada banyak pendapat mengenai konflik ini. Sebagian kaum muslimin ada yang menganggap bahwa konflik tersebut adalah antara

Palestina-Israel. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa konflik tersebut adalah konflik Arab-Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan sebagai konflik bangsa yang terusir dengan kaum pendatang.

Gambaran yang sebenarnya mengenai konflik Palestina ini, bisa dikaji dari sebab terjadinya konflik. Dari kacamata Palestina, sejarah Negara ini diawali dengan peristiwa Isra', yakni perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Jerusalem (Palestina) menandai awal hubungan historis Islam dengan Palestina. Kemudian pada kira-kira abad ke-7, Palestina berhasil dikuasai oleh Umar bin Khatab, khalifah kedua setelah Abu Bakar.

Pada tahun 636 M, orang-orang Nasranilah yang secara sukarela menyerahkan kunci gerbang kota Yerusalem kepada khalifah Umar Bin Khatab. Pihak Nasrani yang diwakili tokohnya, Pendeta Sofarniyus, yang bersama-sama Khalifah Umar Bin Khatab menyepakati suatu perjanjian yang dikenal dengan Piagam 'Illia atau Perjanjian Umariyah. Sejak saat itu wilayah Syam yang mencakup kawasan Palestina menjadi wilayah Islam, milik kaum muslimin (Yahya, 2005).

Lain lagi dengan Israel yang memandang akar masalahnya lebih jauh ke belakang dalam sejarahnya. Yaitu pengusiran bangsa Yahudi dari tanah air mereka di tanah suci dengan ditandai penghancuran Haykal Sulaiman tahun 70 M, yang oleh para pengamat sering dianggap sebagai awal dari eksodus besar-besaran kaum Yahudi keluar dari Palestina. Akibat pengusiran ini mereka terpaksa bermigrasi ke tempat-tempat yang jauh dimana mereka hidup atas belas kasihan bangsa-bangsa yang sering memusuhi mereka. Sepanjang sejarah diaspora (istilah Yunani yang berarti pemencaran atau penyebaran) yang panjang ini, impian untuk kembali ke tanah air mereka dan bersatu tidak pernah mereka lupakan di pengasingan.

Pada saat mengungsi, orang Yahudi banyak mendapat penolakan dari negara-negara lain. Karena penolakan itu orang-orang Yahudi berkolaborasi dengan para penjajah Barat untuk mewujudkan impian mereka, yaitu mendirikan negara Yahudi di bumi Palestina. Impian ini baru terlaksana, setelah runtuhnya kekhalifahan Islam yang terakhir. Tanpa halangan yang berarti, pembentukan Negara Israel diproklamkan pada 14 Mei 1948 oleh David Ben Gourion. Berdirinya Negara Israel ini tidak terlepas dari cita-cita awal Theodore Herzl pada tahun 1896. Kongres pertama gerakan Zionis diselenggarakan di Basle-Swiss tahun 1897 merekomendasikan berdirinya sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi yang cerai berai di seluruh dunia. Pada kongres kedua tahun 1906, gerakan zionis pimpinan Herzl merekomendasikan dengan tegas untuk mendirikan sebuah negara bagi Yahudi di tanah Palestina (Rahman, 2002a).

Berdirinya negara Israel ini berdasarkan legitimasi resolusi PBB no. 181. Dengan keluarnya resolusi tersebut, pemerintah AS ikut menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel, kemudian disusul pengakuan dari Uni Soviet. Berikutnya negara baru Israel tersebut berhasil masuk menjadi anggota penuh PBB. Pertempuran yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan wilayah selalu muncul seiring dengan lahirnya negara Israel, yang tidak hanya melibatkan bangsa Palestina-Israel, akan tetapi negara-negara Arab dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika Serikat.

Akibat dari konflik tersebut, masyarakat Palestina menjadi terpecah. Sebagian dari mereka mengungsi ke negara-negara Arab tetangga dan sebagian lainnya tetap bertahan di Palestina (Israel). Sementara itu, warga Palestina yang ada di pengasingan, telah mendirikan sejumlah organisasi perlawanan dengan berbagai nama. Tidak kurang dari 15 nama organisasi perlawanan Palestina muncul, dan semuanya bercita-cita ingin mendirikan "Negara Palestina". Dari sekian banyak organisasi, hanya satu yang dianggap sebagai wakil sah rakyat Palestina, yaitu *Palestine*

Liberation Organization (PLO). PLO ini didirikan oleh para pemimpin Arab pada tahun 1964, dengan maksud untuk menyaingi dan mengendalikan beberapa organisasi perlawanan yang sudah ada.

Dalam konflik Israel-Arab di Palestina ini, usaha menuju perdamaian, bukanlah hal yang tidak pernah dicoba. Upaya penyelesaian konflik telah banyak dilakukan oleh pihak Arab dan Israel dengan dibantu oleh beberapa pihak ketiga yang berperan sebagai mediator seperti Inggris, PBB, maupun Amerika Serikat. Bahkan PBB telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak yang berseteru ini. Berbagai peringatan dan kecaman telah disampaikan kepada keduanya untuk segera menghentikan persengketaan, berpuluh-puluh resolusi telah dikeluarkan, tetapi belum juga ada indikasi ke arah perdamaian dan penghentian konflik. Sampai akhirnya Amerika Serikat secara pribadi dan sukarela menawarkan bantuan untuk dapat berperan sebagai mediator dalam proses perdamaian ini.

Usaha menuju proses perdamaian sebenarnya sudah terlihat tanda-tandanya sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Israel dengan Mesir di Camp David, Amerika Serikat, pada tahun 1978. Setelah 13 hari berpolemik, ancaman *walk out*, dan aksi heroik Presiden Carter, akhirnya ketiga pemimpin itu berhasil keluar dengan dua kerangka perdamaian (*two framework of peace*). Sebuah perjanjian damai antara Mesir dengan Israel dan sebuah perjanjian damai untuk penyelesaian masalah Palestina. Setelah beberapa minggu pasca perundingan itu, bayangan pesimisme dan kegagalan akan perundingan sekali lagi menghantui. Perseteruan kembali terjadi. Meskipun Sadat dan Carter meninggalkan Camp David dengan anggapan telah berhasil meyakinkan Begin untuk segera meninggalkan Tepi Barat dan Gaza dalam tempo lima tahun. Tetapi Begin, tetap berkeyakinan bahwa ia hanya menyetujui penundaan pendudukan selama tidak lebih dari tiga bulan.

PLO selalu menawarkan perundingan dengan Israel, tetapi tawaran-tawaran ini ditolak Israel karena PLO masih dianggap sebagai gerakan teroris. Sikap Israel terhadap penyelesaian konflik Arab-Israel mulai melunak terutama setelah Perang Teluk II. Pasca perang ini Amerika Serikat menekan Israel agar bersedia berunding dengan Palestina khususnya dan Arab pada umumnya. Tekanan Amerika Serikat membuahkan hasil dengan diadakannya konferensi di Madrid tahun 1991 yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Arab-Israel. Konferensi Madrid merupakan cikal bakal lahirnya Deklarasi Prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel. Dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implikasi perjanjian damai sebagai strategi pemerintah Israel untuk meredam aksi intifadah Hamas. Selain itu, akan dilihat juga apa keuntungan dan kerugian yang didapat Israel dengan menerima perjanjian damai dengan PLO. Selanjutnya, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka dalam pembahasannya, penulis membatasi perjanjian damai antara Israel dan PLO yang dikenal dengan deklarasi Prinsip tanggal 13 September 1993, dan adanya peristiwa intifadah pada tahun 1987, hingga peristiwa intifadah Al Aqsho 2000. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dari buku-buku, artikel dan jurnal yang relevan dengan tema yang diteliti.

Perjanjian Damai Sebagai Strategi Israel dalam Meredam Aksi Intifadah Hamas

Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, maka penulis akan menggunakan model aktor rasional yang digagas oleh Graham T. Allison dalam mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang utuh kemauannya (monolit), yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan, pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual dan perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi dengan melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, penalaran tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh, individu-individu ini berusaha menetapkan pilihan-pilihan atas alternatif-alternatif yang ada dengan menggunakan kriteria "*optimalisasi hasil*" atas alternatif yang dijadikan pilihan tersebut. Atau dengan kata lain pembuatan keputusan atas berbagai alternatif yang ada itu diambil berdasarkan pada tujuan akhir atau hasil yang lebih optimal diantara pilihan alternatif yang ada tersebut (Allison, 1971). Para pembuat keputusan dalam model ini digambarkan bahwa dalam menerapkan kebijakannya harus selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian. Mereka bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Analisis politik luar negeri dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan luar negeri haruslah memusatkan perhatian pada penekanan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahannya dan perhitungan untung dan rugi atas masing-masing alternatif tersebut (Allison, 1971).

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalnya. Para pembuat keputusan dianggap rasional dan umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan terutama menyangkut politik luar negeri itu dibuat secara rasional. Oleh sebab itu, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan pilihan yang layak, mengingat tujuan-tujuan strategis dari suatu bangsa yang pasti menguntungkan tujuan atau kepentingan nasionalnya.

Adapun unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, serta perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.

Pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional. Sejalan dengan teori diatas, kebijakan yang diambil Pemerintah Israel untuk menerima tawaran perdamaian dari PLO dianggap sebagai pilihan yang paling rasional atas alternatif-alternatif yang ada. Begitu juga halnya dengan pembuatan keputusan politik luar negeri yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Israel yang semula menolak tawaran damai dari PLO sebagai wakil pemerintah otonomi Palestina dengan alasan karena PLO dianggap sebagai gerakan teroris. Tetapi seperti penjelasan model aktor rasional di atas, bahwa keputusan pemerintah dapat berubah berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Dengan semakin meningkatnya intifadah, melalui serangan bersenjata oleh Brigade Izzudin al Qossam (sayap militer Hamas) dan jihad Islam serta perlawanan sipil rakyat Palestina, mengharuskan Israel mengeluarkan biaya yang besar untuk mengontrol wilayah pendudukan. Namun, usaha ini belum menunjukkan tanda-tanda bahwa gerakan intifadah akan berakhir. Sebagai Aktor rasional, Israel harus berpikir mengenai pilihan lain yang lebih menguntungkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka kebijakan yang ditempuh oleh Israel adalah menerima perjanjian damai dengan PLO sebagai usaha untuk meredam aksi intifadah Hamas.

Intifadah Sebagai Reaksi Dari Bangsa Palestina Terhadap Konflik Israel Palestina yang Tidak Kunjung Selesai

Berbagai cara telah di tempuh oleh bangsa Palestina dan juga bangsa Arab untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Bahkan perdamaian yang melibatkan pihak di luar Palestina sebagai perantara pun pernah dicoba. Dan hal ini tidak juga membuahkan hasil. Karena cara damai tidak memberikan hasil yang signifikan, maka ditempuhlah cara baru oleh bangsa Palestina untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Perlawanan model baru ini mereka sebut sebagai intifadah. Perjuangan model baru ini dilakukan oleh kelompok Islam garis keras Palestina, Hamas. Intifadah ini cukup efektif untuk memberikan tekanan kepada Israel, sehingga pada akhirnya perjuangan ini dapat mengubah kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina.

Buntutnya hampir semua langkah baik militer maupun politik yang ditempuh negara-negara Arab dan PLO dalam mewujudkan negara Palestina merdeka melatarbelakangi munculnya perjuangan model baru bangsa Palestina, yaitu intifadah. Gerakan intifadah yang dalam bahasa Arabnya berarti "melepaskan diri" ini, meletus pada 9 Desember 1987. Aksi ini awalnya terjadi di lingkungan ramai Jalur Gaza dan segera menyebar ke Tepi Barat. Intifadah melibatkan 1,7 juta orang Palestina yang hidup di bawah pendudukan sejak tahun 1967. Penyebab langsung pemberontakan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1987, yakni ketika sebuah truk angkatan bersenjata Israel menabrak sekelompok orang Palestina di dekat kamp pengungsi Jabalya di Jalur Gaza. Insiden yang dilakukan oleh Israel ini membunuh empat orang Palestina dan melukai tujuh orang lainnya. Tindakan Israel ini dipicu oleh kematian seorang pedagang Yahudi yang ditikam di Gaza pada tanggal 6 Desember 1987 (Quthb, 1997). Para pengamat juga memperkirakan bahwa gerakan intifadah ini juga didorong oleh tindakan berani dari seorang gerilyawan Palestina, yang dengan satu tangan berhasil membunuh enam serdadu Israel dalam suatu serangan lewat pesawat layang gantung.

Aksi perlawanan seperti ini kemudian menjadi sebuah alternatif perjuangan bangsa Palestina sebagai bentuk pertentangan terhadap penguasa Israel. Melalui perlawanan seperti ini, rakyat seolah-olah dapat melampiaskan kebencian mereka yang selama ini dijajah oleh Israel. Perlawanan semesta bangsa Palestina inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan intifadah bagi rakyat Palestina.

Berbicara mengenai gerakan intifadah yang lahir di wilayah pendudukan tidak akan pernah terlepas dari badan yang melahirkannya, yaitu *Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah* (Hamas) atau Gerakan Perlawanan Islam. Kelahiran intifadah ditandai dengan pertumpahan darah di Al

Maqturah. Sepekan kemudian, tepatnya hari Selasa tanggal 15 Desember 1987, Syaikh Ahmad Yasin sebagai pemimpin Hamas, memproklamasikan secara resmi dimulainya intifadah.

Kelahiran intifadah tidak hanya disambut di Palestina, tapi juga di Jabalia, Rafah, Darj di Gaza, Yerusalem, al Kahlil sampai Tepi Barat Sungai Yordan. Sebagian besar kaum muslimin Palestina ingin berpartisipasi dan menyatakan solidaritasnya kepada intifadah, terutama sekali para pemudanya. Mereka sangat bersemangat untuk menyambut seruan intifadah (Quthb, 1997).

Dengan gerakan intifadah ini, Hamas menjadi suatu organisasi perlawanan yang efektif di wilayah pendudukan. Perjuangan yang dilakukan Hamas ini mengakar ke seluruh rakyat Palestina. Masjid-masjid baru dibangun dengan swadaya, khatib-khatib muda dan imam-imam masjid yang telah dibina dengan baik disebar, lembaga-lembaga pendidikan dari mulai TK sampai perguruan Tinggi didirikan dan lembaga-lembaga sosial serta bantuan umum diangkat ke permukaan untuk membantu kalangan yang lemah dan dhuafa. Gerakan Hamas ini banyak dipengaruhi oleh Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ahmad Yasin, yang merupakan pimpinan pertama Hamas ini, juga merupakan anggota dari Ikhwanul Muslimin (Mahmud, 1997).

Dalam memahami asal-usul dan sifat gerakan modern Islam, termasuk Hamas, tidak akan terlepas dari peran organisasi yang dominan dalam kancah politik dunia Islam abad ke-20. Pendiri dan ideologinya adalah Hasan Al Banna dan Sayyid Quthb. Organisasi ini telah memperlihatkan pengaruh mereka yang cukup besar dalam perkembangan organisasi modern Islam di segenap penjuru Islam. Dalam makna pemikiran sesungguhnya, mereka memodernkan Islam dengan mengemukakan interpretasi atau reformasi modern atas Islam untuk menghidupkan kembali masyarakat Islam, baik dari segi agama ataupun kondisi sosio-politisnya. Al-Banna dan Quthb melakukan sebuah sintesis baru yang dimulai dari sumber-sumber Islam dan mencari akar-akar persamaannya dengan Islam atau sumber-sumber ajaran Islam (Mahmud, 1997).

Reinterpretasi Al-Banna atas sejarah dan tradisi Islam menghasilkan suatu cara pandang ideologis yang menginspirasi dan menjadi rujukan berbagai gerakan reformasi sosio moral yang berorientasikan Islam. Islam *worldview* ini tidak hanya menjadi dasar bagi organisasi yang mereka pimpin, tetapi juga menjadi landasan berfikir bagi gerakan-gerakan Islam lainnya yang menyebar di seluruh dunia pada dekade sesudahnya.

Diantara prinsip-prinsip pandangan-dunia, ideologis Al-Banna adalah sebagai berikut (Mahmud, 1997): 1) Islam adalah ideologi yang lengkap bagi individu dan kehidupan bersama bagi negara dan masyarakat. 2) Al-Qur'an, yang merupakan wahyu Allah, dan teladan (sunnah) Rasul Allah adalah dasar bagi kehidupan kaum muslimin. 3) Hukum Islam (syari'ah) didasarkan pada Al-Qur'an dan teladan Rasul Allah yang menjadi cetak biru bagi kehidupan kaum muslimin. 4) Keteguhan dalam berpegang pada tujuan muslim dalam menegakkan kerajaan Allah. 5) Kelemahan dan perbudakan yang dialami masyarakat muslim bersumber kepada ketiadaan iman kaum muslim. Mereka telah terjauhkan dari jalan yang telah ditetapkan Allah dan mengikuti jalan sekuler, ideologi-ideologi materialistik, dan nilai-nilai yang datang dari Barat dan Timur, yakni kapitalisme dan Marxisme. 6) Untuk menumbuhkan kembali harga diri, kekuatan, kekuasaan kaum muslim (dengan menunjuk ke masa lalu yang gemilang yang pernah dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam dan puncak kebudayaan mereka), maka umat Islam harus kembali pada Islam, mentaati kembali hukum-hukum Allah dan bimbingan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. 7) Ilmu dan teknologi harus diperkuat dan digunakan dalam kerangka Islam dan konteks terencana untuk menghindari proses westernisasi dan sekularisasi dalam diri masyarakat Muslim.

Bagi ikhwan, hanya ada dua pilihan: kegelapan atau cahaya, setan atau Tuhan, kekafiran atau Islam. Inti ajaran Ikhwan adalah keyakinan bahwa Islam adalah suatu hidayah Illahi yang menjadi alternatif ketiga sesudah kapitalisme Barat dan Marxisme Soviet. Dan dari sinilah Hamas lahir sebagai hasil dari akumulasi berbagai faktor yang dialami oleh rakyat Palestina, sejak tragedi pertama tahun 1948 secara umum dan kekalahan perang tahun 1967 secara khusus. Dari berbagai faktor tersebut muncul dua faktor utama yaitu: (1) perkembangan politik masalah Palestina dan akibat-akibatnya hingga akhir tahun 1987 (2) dan kebangkitan Islam di Palestina serta hasil-hasil yang dicapai hingga pertengahan dekade 80-an (Mahmud, 1997).

Semakin jelas bagi rakyat Palestina bahwa masalah mereka adalah masalah hidup dan mati, masalah pertarungan peradaban antara Arab dan Umat Islam di satu pihak dan Zionisme di pihak lain. Isu tersebut berkembang menjadi masalah pengungsi setelah tragedi tahun 1948 atau masalah penuntasan hasil-hasil agresi dan lepasnya dua pertiga Palestina setelah kekalahan 1967. Hal inilah yang mendorong rakyat Palestina untuk memperjuangkan nasibnya dengan tangan mereka sendiri. Maka muncullah PLO dan berbagai kelompok perlawanan rakyat.

Akan tetapi program pemberontakan rakyat Palestina yang terakomodasi dan terkristalisasi dalam tubuh PLO pada dekade 80-an mengalami deretan kemunduran internal dan eksternal yang melemahkan program tersebut, mengaburkan visi dan orientasinya. Dan terlihat pada dekade 70-an banyak indikasi yang menunjukkan kemungkinan PLO untuk menerima solusi-solusi tengah yang bertentangan dengan isi Dokumen Nasional Palestina. Kecendrungan tersebut berubah menjadi tuntutan Palestina yang secara jelas semakin menguat setelah perjanjian Camp David. Selanjutnya disusul dengan agresi Israel terhadap Lebanon Selatan, kemudian blokade Beirut tahun 1982 yang merupakan penghinaan terbesar bagi umat Islam sejak perang 1967.

Dalam situasi seperti ini di mana tuntutan normalisasi mendapat dukungan dari para pimpinan PLO, strategi perlawanan bersenjata mengalami kemunduran. Sebagai mana perhatian dunia Arab dan Internasional juga menurun. Bahkan sebagian besar negara Arab ketika itu gencar menanamkan paham regionalisasi dengan semangat fanatisme golongan - sengaja ataupun tidak. Khususnya setelah Liga Arab menetapkan dalam KTT Rabath tahun 1973 bahwa PLO adalah perwakilan resmi dan satu-satunya bagi rakyat Palestina. Setelah meletusnya perang Irak - Iran masalah Palestina menjadi masalah marginal, baik di tingkat regional maupun internasional. Berbarengan dengan hal itu posisi Israel semakin solid dengan dorongan dan bantuan dari Amerika Serikat, yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan Israel, tahun 1981. Tahun di mana diproklamákannya penggabungan Dataran Tinggi Golan dengan Israel, dan dihancurkannya reaktor nuklir Irak (Mahmud, 1997).

Di satu sisi Negara-negara Arab menggantungkan harapannya pada birokrasi Amerika yang silih berganti, ekstrimisme Zionis mencapai tujuannya melalui hegemoni partai-partai kanan terhadap kebijakan politik Israel dan politik kekerasan yang dipakai Israel sejak beberapa dekade. Oleh karena itu, dilaksanakanlah operasi Hamam as-Syath di mana kantor PLO di Tunis dibombardir oleh Israel pada bulan Oktober 1985. Semua yang dilakukan oleh Israel tersebut mendapat dorongan dan dukungan penuh dari pemerintah Amerika.

Di tingkat internasional, Amerika Serikat telah melangkah jauh meninggalkan Uni Soviet dalam menancapkan keinginan dan pengaruhnya, tidak hanya terhadap Timur Tengah bahkan terhadap seluruh dunia. Di mana problem-problem dalam negeri Soviet yang semakin parah hari demi hari, memaksa untuk lebih memperhatikan kondisi internal. Konsentrasi yang tinggi terhadap

masalah-masalah tersebut menimbulkan kemunduran prioritas Uni Soviet dan mundurnya Soviet secara gradual dari konflik-konflik regional. Sehingga akhirnya mereka tinggalkan medan untuk Amerika. Peranan Uni Soviet terhenti secara tidak diduga oleh pemerintah negara-negara Arab dan mayoritas gerakan-gerakan perlawanan Palestina, dan banyak menimbulkan kerugian terhadap posisi politis mereka dalam perjuangan.

Bumi Palestina menyaksikan perkembangan yang jelas dan nyata dalam tumbuh dan tersebarnya Kebangkitan Islam, seperti di wilayah Arab lainnya. Hal yang membuat Gerakan Islam tumbuh dan berkembang baik dalam pemikiran maupun organisasi, di Palestina dan di berbagai perkumpulan masyarakat Palestina di tempat lain. Arus keislaman di Palestina menyadari bahwa mereka menghadapi sebuah tantangan besar yang akarnya kembali pada dua hal: Pertama, merosotnya masalah Palestina dalam daftar prioritas negara-negara Arab. Kedua, mundurnya proyek revolusi Palestina dalam menghadapi proyek Zionisme dan seluruh "komoditinya", yang kemudian menjadi terkotak pada masalah koeksistensi dan membatasi pembicaraan hanya pada syarat-syarat koeksistensi tersebut. Di tengah dua kemunduran tersebut, dan bertumpuknya akibat buruk dari kebijakan-kebijakan Penjajah Zionis yang merugikan rakyat Palestina, dan ditambah dengan matangnya ide perlawanan dari rakyat Palestina maka muncullah proyek Jihad Palestina yang Islami. Cikal bakalnya muncul dalam bentuk *Usroh al-Jihad* (keluarga Jihad) tahun 1981, dan Kelompok Syaikh Ahmad Yasin tahun 1983, serta gerakan lainnya (Mahmud, 1997).

Di akhir tahun 1987, kondisi sudah cukup matang untuk munculnya sebuah proyek baru menghadapi Israel dan perpanjangannya. Program yang berdiri di atas dasar-dasar yang baru sesuai dengan perkembangan di dalam dan luar Palestina. Maka muncullah Gerakan Perlawanan Islam (*Harakah al-Muqowamah al-Islamiyyah*) atau yang disingkat dengan Hamas. Hamas datang sebagai reaksi natural terhadap berbagai kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina serta masalah ketidakadilannya sejak imperialis Israel menjajah Palestina secara total pada tahun 1967 (Shaleh, 2002).

Peristiwa penabrakan yang dilakukan oleh sopir truk Yahudi, yang terjadi pada tanggal 6 Desember 1987 terhadap mobil kecil yang ditumpangi pekerja Palestina serta menyebabkan meninggalnya empat rakyat Palestina dari Kamp Pengungsi Jabalia, adalah awal pengumuman tahapan baru bagi jihad rakyat Palestina. Reaksi yang muncul adalah adanya mobilisasi umum. Maka keluarlah pernyataan yang pertama dari Hamas pada tanggal 15 Desember 1987, sebagai pemberitahuan akan dimulainya tahapan baru jihad rakyat Palestina melawan penjajahan Zionisme Israel. Inilah fase di mana arus keislaman menjadi ujung tombak dalam perlawanan.

Tekanan Intifadah Terhadap Israel

Kemunculan Hamas menimbulkan kegelisahan bagi Israel. Terutama ketakutan terhadap aksi intifadah yang dilakukan oleh Hamas. Aparat Intelijen Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk mengawasi Hamas dan pimpinannya. Gerakan intifadah telah menimbulkan dampak ekonomi terhadap Israel, menurut Howard Rosen, tiga sektor ekonomi yang terpengaruh maraknya intifadah, yaitu: pertanian, konstruksi, dan pariwisata (Rosen, 1991).

Sejak berlangsungnya Intifadah, para petani Israel harus mengamankan lahan dan peralatan pertanian mereka dari tindakan yang merusak dan kebakaran. Di samping itu mereka juga harus mengupah buruh untuk mengangkut hasil pertaniannya. Selain itu, karena sebagian besar buruh di pertanian Israel adalah orang-orang Palestina, maka aksi pemogokan yang dilancarkan para buruh

Palestina menimbulkan kelangkaan tenaga kerja. Para petani Israel sulit mendapatkan buruh alternatif selain orang-orang Palestina. Akibatnya hasil pertanian mereka hancur oleh cuaca, karena tidak secepatnya diangkut ke tempat-tempat penyimpanan. Selain itu memanasnya suhu politik mengakibatkan turunnya ekspor hasil pertanian Israel (Rosen, 1991).

Bidang konstruksi juga mengalami penurunan cukup tajam. Hal ini disebabkan karena penopang utamanya adalah tenaga kerja Palestina. Sebelum intifadah meletus ada sekitar 40.000-50.000 orang Palestina bekerja pada Israel, 70 % dari Gaza dan mereka bekerja di sektor konstruksi. Beberapa bulan selama berlangsung intifadah 50 % pekerja melancarkan mogok. Di samping itu, Israel sulit mendapatkan tenaga kerja pengganti yang sama murahannya dengan tenaga kerja Palestina. Dampaknya adalah proyek-proyek Israel menjadi terbengkalai (Rosen, 1991).

Terakhir bidang pariwisata, sektor ini merupakan anadalan Israel. Di Israel, termasuk wilayah pendudukan, terdapat tempat-tempat suci bagi tiga agama besar yakni, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Tempat-tempat suci tersebut sangat potensial untuk menarik wisatawan asing. Nilai strategi dari sektor ini adalah pendapatannya dapat digunakan untuk membayar hutang luar negeri. Namun adanya instabilitas politik oleh intifadah menyebabkan jumlah wisatawan mengalami penurunan. Sebagai gambaran, bahwa pada bulan-bulan awal intifadah jumlah wisatawan dari Amerika Serikat dan Jerman mengalami penurunan 15 %, dari Perancis 25%, dari Inggris 6% dan dari negara-negara lain di luar keempat negara tersebut, turun sebanyak 16% (Rosen, 1991).

Selain tiga sektor ekonomi di atas, dampak intifadah yang lain adalah mengakibatkan bertambahnya anggaran militer pemerintah Israel. Baru satu tahun intifadah, Israel harus mengeluarkan dana sebesar US \$ 225 juta untuk belanja militer (1988). Satu tahun berikutnya harus ditambah US \$ 125 juta. Pertambahan ini termasuk biaya kompensasi dan peningkatan gaji para serdadu yang ditempatkan di Jalur Gaza dan Tepi Barat (Rosen, 1991).

Di bidang politik, kebangkitan rakyat Palestina menentang penguasa pendudukan membuka kedok kepalsuan demokrasi Israel. Dunia dapat menyaksikan kekejaman-kekejaman Israel dalam upaya menghentikan intifadah melalui media masa. Klaim bahwa Israel adalah negara paling demokratis di wilayah Timur Tengah, ternyata hanya berlaku untuk orang-orang Israel saja. Sementara orang-orang arab mengalami diskriminasi. Agar keburukan-keburukan Israel tidak diketahui masyarakat internasional, pemerintah Israel pernah melarang para wartawan memasuki wilayah pendudukan untuk meliput intifadah.

Intifadah yang pada awalnya terjadi di Kamp Jabaliya Jalur Gaza, dapat menyebar ke semua wilayah pendudukan. Gerakan ini mampu menyatukan warga Palestina dari berbagai latar belakang pemikiran dan keluarga. Lebih dari itu, mati syahid telah menjadi angan-angan setiap individu, baik besar maupun kecil, tua, muda, laki-laki dan wanita. Solidaritas tidak hanya di wilayah pendudukan tetapi juga di wilayah Israel.

Menurut sumber pemerintahan Israel sebelum tahun 1987 (sebelum intifadah meletus) terjadi 60 kali teror dan sabotase didalam wilayah Israel. Dua tahun setelah intifadah, terjadi 208 kali insiden di dalam wilayah Israel. Insiden ini terdiri dari 170 kali serangan bom molotov, 20 kali aksi pengeboman, 18 kali aksi penusukan dan serangan bersenjata. Serangan-serangan tersebut, 70-80% dilakukan minoritas Arab yang tinggal di wilayah Israel (Rekhess, 1991).

Di antara dampak politik yang sangat mengkhawatirkan Israel adalah semakin populernya gerakan perlawanan Islam (Hamas) di wilayah pendudukan. Sikap tegas Israel justru semakin

meningkatkan militansi gerakan ini. Berbagai media dan sarana yang dimiliki, serta basis gerakan yang ada di wilayah pendudukan memungkinkan Hamas mendapat dukungan dari rakyat Palestina. Populernya kelompok garis keras yang tidak mengenal kata “damai” akan semakin menyulitkan Israel.

Intifadah yang dilakukan Hamas berhasil membuat ciut nyali tentara Israel. Aksi yang hanya berbekalkan ketapel dan batu oleh ribuan pemuda dan remaja tanggung, ternyata mampu membuat gentar tentara Israel yang dilengkapi dengan senjata berat. Tentara Israel kewalahan menghadapi perlawanan sipil semacam. Israel memiliki banyak pengalaman menghadapi musuh di medan-medan pertempuran, namun menghadapi anak-anak muda atau bahkan anak di bawah umur yang hanya bersenjatakan batu, ketapel dan bom-bom molotov di seluruh wilayah pendudukan, Negara Zionis ini kewalahan.

Pemerintah Israel mencoba menghentikan intifadah dengan cara-cara militer yang memakan korban cukup besar di pihak Palestina. Akan tetapi ternyata cara ini tidak cukup efektif untuk menghentikan aksi intifadah Hamas. Bahkan akibat tindakannya ini, Israel mendapatkan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Israel berusaha mencari jalan lain untuk meredam aksi intifadah Hamas ini. Kebijakan Israel tersebut dengan cara menerima tawaran damai terhadap bangsa Palestina melalui PLO, yang selama ini selalu ditolaknya. Sikap Israel makin melunak setelah ditekan oleh negara sahabatnya, Amerika yang menginginkan agar Israel berunding dengan pihak Palestina khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Tekanan Amerika Serikat membuahkan hasil dengan diadakannya konferensi Di Madrid tahun 1991 yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Arab-Israel. Konferensi Madrid merupakan cikal bakal lahirnya Deklarasi prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.

Resolusi Konflik Sebagai Implikasi Dari Aksi Intifadah Hamas

Graham T. Allison menjelaskan bahwa negara merupakan aktor rasional yang akan memutuskan berbagai pilihan kebijakan yang dianggap paling menguntungkan dalam rangka memperoleh kepentingan nasionalnya (Allison, 1971). Negara akan mengambil kebijakan dalam rangka mengoptimalkan hasil berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Dalam kebijakannya tersebut, negara akan menjauhi tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya.

Dalam konteks ini, Israel sebagai aktor rasional melihat bahwa perlawanan terhadap intifadah-Hamas dengan kekuatan militer menimbulkan kerugian. Pemerintah Israel perlu memilih alternatif lain untuk menghadapi gerakan intifadah Hamas sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari konsekuensi yang merugikan Israel. Kebijakan tersebut yaitu menerima tawaran damai dengan pemerintah Palestina (PLO). Israel yang selama ini tidak pernah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil sah bangsa Palestina dalam setiap perundingan, karena masih dianggap sebagai gerakan teroris, mau duduk berunding dengan PLO.

Sikap Israel terhadap penyelesaian konflik Arab-Israel mulai melunak dengan melihat kerugian yang dirasakan oleh gerakan intifadah Hamas. Disamping itu, adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk berunding dengan Palestina. Usaha ini membuahkan hasil, dengan terselenggaranya konferensi Madrid tahun 1991 yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai

dalam konflik Arab Israel. Konferensi Madrid merupakan cikal bakal lahirnya Deklarasi Prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.

Konferensi Madrid merupakan perundingan yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, George Bush, dan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, meskipun dalam pelaksanaannya yang lebih berperan adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker, dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Boris Pankin. Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Madrid ini adalah selain untuk menyelesaikan masalah Palestina-Israel, juga lebih dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik Israel dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, maka dalam perundingan ini pesertanya tidak hanya dari pihak Israel dan Palestina, melainkan melibatkan juga negara-negara Arab tetangga Israel, seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Libanon.

Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 1991 ini memilih Madrid, ibukota Spanyol, sebagai tempat perundingan karena tempat ini dianggap netral. Perundingan yang berlangsung sampai sebelas putaran itu ternyata tidak menghasilkan penyelesaian yang berarti karena adanya beberapa kelemahan (Setiawati, 1996). Pertama, Israel tidak menghendaki pihak Palestina diwakili oleh PLO padahal sejak tahun 1973 PLO telah diakui oleh negara-negara Arab sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Palestina, dan di tahun 1974 PBB juga telah mengakui PLO sebagai anggota istimewa. Alasan Israel tidak bersedia berunding dengan PLO karena organisasi ini dianggap sering melakukan tindakan terorisme terhadap Israel, dan bertujuan untuk menghancurkan negara Israel yang berarti melenyapkan eksistensi Israel.

Kedua, Israel sejak awal memang tidak bersedia melakukan kompromi dengan pihak Arab mengenai wilayah Arab yang didudukinya sejak Perang 1967, padahal sebenarnya inti dari konflik Arab-Israel adalah masalah teritorial. Sementara Israel lewat Perdana Menteri, Yitzak Shamir, menegaskan bahwa perundingan Madrid tidak akan membahas masalah teritorial, tetapi masalah eksistensi Israel. Ketiga, pihak AS yang menempatkan diri sebagai penengah terlalu berpihak kepada Israel. Sebagai contoh, AS tidak mendesak Israel untuk mentaati Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 yang mengharuskan Israel mundur dari wilayah yang didudukinya sebagai syarat sebelum menuju perundingan. Justru sebaliknya, AS malah menawarkan bantuan sebesar 10 milyar USD guna pembangunan pemukiman Yahudi asal Uni Soviet di wilayah pendudukan Tepi Barat. Lebih dari itu, AS bersama-sama dengan Israel dalam waktu bersamaan juga tengah mengupayakan dihapuskannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 3379 yang menyamakan Zionisme dengan diskriminasi rasial (Setiawati, 1996).

Namun nampaknya perundingan kali ini amat diwarnai oleh adanya kepentingan AS. Minimal AS berkepentingan untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara Arab pasca-Perang Teluk II yang berakhir pada awal tahun 1991. Dimana dalam perang tersebut banyak negara Arab yang mulai mewaspadaikan politik luar negeri AS di Timur Tengah yang cenderung menghancurkan negara-negara yang menurutnya akan membahayakan eksistensi Israel. Perang Teluk II (invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990) rupanya hanya dijadikan dalih untuk menyerang Irak dan menghancurkan negeri yang mempunyai potensi untuk mengembangkan persenjataan nuklir guna menghancurkan Israel. Kecurigaan ini ingin dihapus AS dengan cara mengupayakan perdamaian bagi konflik Arab-Israel, yang sekaligus diharapkan dapat menarik simpati negara-negara Arab.

Kepentingan lain AS, yaitu mendesak Uni Soviet untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel yang telah terputus sejak tahun 1967, karena Uni Soviet menganggap Israel sebagai agresor. Sehingga pada akhirnya, perundingan ini hanya memenuhi kepentingan AS

saja, sedangkan upaya untuk merundingkan perdamaian antara Israel dengan Arab Palestina dapat dikatakan gagal. Selain beberapa faktor itu, kegagalan perundingan ini juga diakibatkan oleh tindakan Israel pada Desember 1992 yang mengusir sekitar 400 warga Palestina asal Jalur Gaza, yang diduga anggota Hamas (Haraqat al-Muqawwamah al-Islamiyah), ke daerah tak bertuan di Libanon Selatan (Setiawati, 1996).

Pasca kegagalan Perundingan Madrid itu, jalan menuju perdamaian terus diupayakan. Yang diwujudkan dengan perundingan perdamaian periode kedua di tahun 1990-an. Perundingan antara PLO dengan Israel yang ditandatangani di Washington pada tanggal 13 September 1993.

Perundingan ini dinamakan Kesepakatan Oslo I, karena perundingan awal dilaksanakan di Oslo, ibukota Norwegia, dengan perantara Menteri Luar negeri Norwegia, Johan Jorgen Holst. Norwegia berperan dalam menciptakan perdamaian ini karena isteri Holst, Marianne Heiberg, adalah seorang peneliti Timur Tengah dan adanya proyek riset Norwegia tentang standar hidup orang-orang Palestina di wilayah pendudukan. Oleh karena itu, meskipun kesepakatan ini ditandatangani di Washington, tetapi guna mengenang jasa Norwegia, maka perundingan ini pun diberi nama Kesepakatan Oslo. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Avi Shlaim, seorang ahli Hubungan Internasional dari Oxford, Inggris, bahwa :

"Although the Declaration of Principles was signed in Washington, with President Bill Clinton acting as master of ceremonies, it had been negotiated in Oslo and initialed there in late August. The Oslo Accord is therefore more fitting name for the historic document than the Washington Accord " (Shlaim, 1994).

Hasil utama dari perundingan ini adalah: pertama, adanya saling pengakuan antara PLO dengan Israel. Dan kedua, adanya Deklarasi Prinsip-Prinsip (*Declaration of Principles*) mengenai pemerintahan interim bagi bangsa Palestina di Gaza dan Jericho di Tepi Barat.

Isi perundingan ini merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara pembentukan dua negara di satu wilayah atau di dalam istilah perundingan dikenal sebagai *a two way state solution* (*A Two Way State Settlement*). Penyelesaian dengan cara ini dianggap sebagai penyelesaian yang paling masuk akal untuk menyelesaikan sengketa dua negara atau dua bangsa yang memperebutkan wilayah yang sama atau dalam istilah politik digolongkan sebagai sengketa teritorial (*territorial disputes*) (Setiawati, 1996).

Dan secara garis besar, perjanjian tersebut terdiri dari empat dokumen, tiga diantaranya berbentuk surat, yaitu surat Yasser Arafat kepada Perdana Menteri Yitzak Rabin, surat kedua dari Arafat kepada Menteri Luar Negeri Norwegia Johan Jorgen Holst, dan surat ketiga dari Rabin kepada Arafat. Ketiga surat ini pada intinya berisi kesepakatan untuk saling mengakui eksistensi antara PLO dan negara Israel. Sedangkan dokumen keempat ialah Deklarasi Prinsip Prinsip yang berisi tentang pembentukan pemerintahan interim Palestina dengan pemberian otonomi terbatas kepada Dewan Nasional Palestina yang ditandatangani di Washington pada 13 September 1993.

Keuntungan Menerima Tawaran Damai Bagi Israel

Keputusan untuk menerima perjanjian damai ini ternyata telah diperhitungkan oleh Israel. Israel sebagai aktor rasional sudah memperhitungkan untung dan ruginya. (Allison, 1971) Karena cara sebelumnya yang dipakai Israel untuk menghadapi perlawanan sipil (intifadah) kurang efektif.

Yaitu dengan menggunakan cara-cara militer. Ketidakefektifan cara yang dilakukan sebelumnya oleh Israel untuk meredam intifadah menjadikan Israel berfikir mengenai alternatif lain untuk meredam intifadah dalam rangka mengoptimalkan hasil. Kebijakan yang lebih menguntungkan adalah dengan cara menerima tawaran damai yang diberikan kepadanya. Kesediaan Israel berunding dengan PLO dan mau menandatangani Deklarasi Prinsip memberikan beberapa keuntungan baginya.

Secara internal, dengan menerima tawaran damai tersebut, Israel mendapat beberapa keuntungan. Pertama, mempunyai jeda waktu untuk menyusun kembali kekuatannya yang sudah sangat berkurang dikarenakan perang. Aksi intifadah yang dilancarkan oleh bangsa Palestina telah banyak menguras tenaga Israel. Gencatan senjata berarti istirahat untuk saling menyerang. Masa perundingan damai ini bisa digunakan Israel untuk mensolidkan kembali pasukan militernya. Dampak intifadah terhadap militer Israel, antara lain dengan banyaknya perwira tinggi militer Israel yang menolak untuk menjalankan tugas. Karena merasa tidak aman dan nyawa mereka sangat terancam, sekitar 62 perwira tinggi dalam militer Israel menolak untuk menjalankan tugas atau desersi terutama yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dan tingkat desersi dari militer Israel terus meningkat sampai 40% dari mereka yang masih aktif bertugas. Dengan adanya perundingan damai ini, maka Israel mempunyai cukup waktu untuk kembali menguatkan dan mensolidkan kembali pasukannya yang ketakutan akibat aksi intifadah.

Kedua, keuntungan di bidang ekonomi, prospek pencabutan embargo ekonomi dunia Arab (terutama negara-negara kaya minyak di Teluk Persia) terhadap Israel akan sangat menguntungkan. Selain itu dengan diserahkannya penanganan aksi perlawanan Palestina di daerah pendudukan kepada otoritas Palestina sendiri, maka Israel bisa berharap mampu memusatkan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita per tahun terus meningkat, yakni US\$ 18,300 pada tahun 2000 yang dianggap pendapatan tertinggi di dunia. Pertambahan nilai ekspor Israel dari US\$ 11,6 miliar pada tahun 1990 menjadi US\$ 23,6 miliar pada tahun 2000. dan pendapatan tahun 2000 ialah sebanyak US\$ 42,4 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi yaitu kurang lebih US\$ 8 miliar dari keseluruhan pendapatan kolektif negara-negara Arab yaitu Mesir, Suriah, dan Libanon (Shaleh, 2002). Disamping itu, penandatanganan perjanjian damai oleh Zionis itu, telah menarik lebih banyak investor dari luar seperti Jepang, Masyarakat Eropa, dan Amerika Serikat.

Ketiga, beban keamanan internal Israel akan jauh berkurang, sehingga Israel dapat menghemat anggaran belanja militernya. Apalagi bila Israel bisa menuntut PLO agar berbagi tanggung jawab, khususnya bagi ketertiban di daerah pendudukan. Sementara pada waktu yang sama Israel akan tetap memegang wewenang keamanan dalam menghadapi ancaman dari luar, serta terus mengontrol garis perbatasan dan akses wilayah otonomi terbatas Palestina dengan dunia luar. Karena, kebutuhan perawatan senjata angkatan darat, laut dan militer untuk menghadapi intifadah menelan biaya yang sangat besar. Belum lagi ditambah biaya harian serdadunya yang banyak mengeluarkan dana dari mulai masalah makanan, pakaian, kondisi barak, kesehatan, perlengkapan perang, tank-tank lapis baja dan lain-lain. Disamping itu, Dengan meningkatnya intifadah, melalui serangan bersenjata oleh Brigade Izzudin al Qossam (sayap militer Hamas) dan jihad Islam serta perlawanan sipil rakyat Palestina mengharuskan Israel mengeluarkan biaya sebesar 294 juta dolar setahun untuk mengontrol wilayah pendudukan. (Setiawati, 1996) Dengan biaya sebesar itu tidak ada tanda-tanda gerakan intifadah akan berakhir. Perjanjian PLO-Israel menyepakati diakhirinya

aksi kekerasan PLO dan komitmen PLO untuk menekan gerakan intifadah. Secara politik Israel terkurangi bebannya dalam menghadapi gerakan Islam militan, secara ekonomi dana sebesar 294 juta dolar tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain.

Tidak hanya secara internal keuntungan diperoleh Israel, namun juga secara eksternal. Keuntungan menerima perjanjian damai secara eksternal juga didapat oleh Israel. Pertama, sikap Israel yang sudah menunjukkan sikap “mau berunding” itu oleh masyarakat internasional dipandang sebagai suatu perubahan yang besar dibandingkan dengan sikapnya terdahulu yang sama sekali anti terhadap kata perundingan dalam penyelesaian masalah Palestina. Kesiediaan Israel berunding dengan PLO, akan menaikkan pamornya di dunia internasional. Ternyata, negara Israel yang selama ini dikenal sebagai negara yang suka berperang mau juga diajak berunding. Sebaliknya, Hamas yang menolak perjanjian perdamaian dikecam sebagai ekstrimis dan teroris. Media cetak dan elektronik Israel pun selalu menambah istilah ‘teroris’ di depan kata Hamas setiap menulis faksi militan Palestina tersebut. Bahkan, sebagian surat kabar Israel menyebut Hamas dengan ‘Nazi baru’ yang hendak membantai warga Yahudi (Rahman, 2002b). Kedua, perdamaian dengan Palestina ini akan mempercepat proses perdamaian Israel dengan negara-negara tetangga Arabnya, dan meningkatkan prospek pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Penandatanganan perjanjian Oslo oleh Palestina dan Israel diikuti oleh beberapa negara Arab yang menjalin hubungan perdagangan melalui perwakilan kedua pihak dan menjaga segala kepentingan mereka (Qatar, Oman, dan Tunisia). Lebih dari 50 negara di dunia telah menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Alasannya ialah jika Israel sudah dianggap “berdamai” dengan Palestina, maka dianggap selesailah masalah inti Timur Tengah. Jadi Israel bisa mengklaim, bahwa kini tidak ada lagi alasan bagi negara-negara lain untuk menolak berhubungan secara resmi dengan Israel. Ini merupakan kemenangan diplomatis yang sangat besar bagi Israel.

Pada tahun 1990, saat PLO mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak Israel melalui Konferensi Madrid 1991. Dilanjutkan dengan Kesepakatan Oslo, tahun 1993. Sejak saat itu, jalan perundingan dan diplomasi menjadi populer di negara-negara Arab. Negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya mulai membuka hubungan resmi dengan Israel. Setelah Mesir (1979). Menyusul Yordania (1994) dan Mauritania (1999) membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan negara-negara Arab lainnya, seperti Qatar, Oman, Maroko dan Tunisia membuka kantor dagang Israel di negaranya masing-masing (Husaini, 2002).

Ketiga, perdamaian sementara dengan PLO akan mengucilkan negara-negara Arab radikal musuh Israel, seperti Libya atau Irak, yang selama ini ikut menggunakan isu Palestina untuk memojokkan Israel. Prospek membaiknya hubungan Isrel dengan beberapa negara Arab pro Barat juga akan mengucilkan Iran. Sebuah kekuatan regional yang dikhawatirkan Israel yang akan jadi musuhnya di masa depan (Husaini, 2002).

Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai bagaimana implikasi perjanjian damai sebagai strategi Israel dalam meredam aksi intifadah Hamas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa menghentikan intifadah, Israel telah mencoba menggunakan cara-cara militer yang memakan korban cukup besar di pihak Palestina. Tapi ternyata cara ini tidak cukup efektif

untuk menghentikan aksi intifadah Hamas. Bahkan akibat tindakannya ini, Israel mendapatkan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai aktor rasional, yang dalam mengambil setiap keputusan berpatokan pada untung dan rugi, maka pemerintah Israel berusaha mencari jalan lain untuk meredam aksi intifadah Hamas ini. Yaitu, dengan menerima tawaran damai terhadap bangsa Palestina melalui PLO, yang selama ini selalu ditolakinya, dalam konferensi Di Madrid tahun 1991 yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Arab-Israel. Konferensi Madrid merupakan cikal bakal lahirnya Deklarasi prinsip yang ditandatangani pada 13 September 1993 oleh PLO dan Israel.

Kesediaan Israel berunding dengan PLO dan mau menandatangani Deklarasi Prinsip memberikan beberapa keuntungan baginya. Yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal, Deklarasi Prinsip memberikan beberapa keuntungan bagi Israel. Pertama, dengan menerima tawaran damai tersebut, Israel mempunyai jeda waktu untuk menyusun kembali kekuatannya yang sudah sangat berkurang dikarenakan perang. Aksi intifadah yang dilancarkan oleh bangsa Palestina telah banyak menguras tenaga Israel. Gencatan senjata berarti istirahat untuk saling menyerang.

Kedua, keuntungan di bidang ekonomi, prospek pencabutan embargo ekonomi dunia Arab (terutama negara-negara kaya minyak di Teluk Persia) terhadap Israel akan sangat menguntungkan. Ketiga, beban keamanan internal Israel akan jauh berkurang, sehingga Israel dapat menghemat anggaran belanja militernya. Karena, kebutuhan perawatan senjata angkatan darat, laut dan militer untuk menghadapi intifadah menelan biaya yang sangat besar. Perjanjian PLO-Israel menyepakati diakhirinya aksi kekerasan PLO dan komitmen PLO untuk menekan gerakan intifadah. Secara politik Israel berkurang bebannya dalam menghadapi gerakan Islam militan, secara ekonomi anggaran untuk militer dapat dialokasikan ke sektor lain.

Sedangkan secara eksternal, sikap Israel mau menerima tawaran damai terhadap Palestina juga mempunyai keuntungan-keuntungan. Pertama, kesediaan Israel untuk berunding dengan PLO, akan menaikkan pamornya di dunia internasional. Ternyata, negara Israel yang selama ini dikenal sebagai negara yang suka berperang mau juga diajak berunding.

Kedua, perdamaian dengan Palestina ini akan mempercepat proses perdamaian Israel dengan negara-negara tetangga Arabnya, dan meningkatkan prospek pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Ketiga, perdamaian sementara dengan PLO akan mengucilkan negara-negara Arab radikal musuh Israel, seperti Libya atau Irak, yang selama ini ikut menggunakan isu Palestina untuk memojokkan Israel. Prospek membaiknya hubungan Israel dengan beberapa negara Arab pro Barat juga akan mengucilkan Iran, kekuatan regional yang dikhawatirkan Israel yang akan jadi musuhnya di masa depan.

Agaknya pilihan untuk menerima tawaran damai menjadi rasionalisasi Israel untuk meredam gerakan intifadah-Hamas. Seperti kata Garaham T. Allison dalam teori aktor rasional, bahwa para pembuat keputusan (decision maker) diasumsikan selalu bertindak rasional, dimana suatu keputusan dibuat secara rasional. Dalam hal ini, para pembuat keputusan akan selalu mengkalkulasi untung dan rugi atas masing-masing alternatif yang ada dalam membuat suatu keputusan. Dalam hal ini pilihan untuk menerima tawaran damai merupakan keputusan yang paling rasional bagi Israel pada saat itu.

Daftar Pustaka

- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Husaini, A. (2002). *Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris yang Pragmatis*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Mahmud, A. A. (1997). *Ikhwatul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, S. (1997). *Manhaj Hubungan Sosial Muslim-Non Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, M. A. (2002a). *Dilema Israel : Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahman, M. A. (2002b). *Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rekhess, E. (1991). *The Arab in Israel and Intifada*. In R. O. red, *The Intifada: Its Impact on Israel, The Arab World and The Super Power*. Miami: Florida International University Press.
- Rosen, H. (1991). *Economic Consequences of the Intifadah in Israel and the Administered Territories*. In R. O. red, *The Intifadah : Its Impact on Israel, The Arab World and The Super Power*. Miami: Florida International University Press.
- Setiawati, S. M. (1996). *Hambatan Pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip Sebagai Resolusi Konflik Israel-Palestina*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Shaleh, M. M. (2002). *Palestina : Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shlaim, A. (1994). The Oslo Accord. *Journal of Palestine Studies*, 24.
- Yahya, H. (2005). *Palestine : Zionisme dan Terorisme Israel*. Bandung: Dzikra.